

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**



**KEPALA DESA KARANGTENGAH KECAMATAN JATIROGO
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Tahun 2017.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Tahun 2017, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Karangtengah khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban pada tahun 2017, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDesa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan, bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Karangtengah Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Desa terkemuka di Kabupaten Tuban, serta Menjadi pusat pertumbuhan Ekonomi.

Kepala Desa Karangtengah,

BASUKI RAHMAD

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
A. TUJUAN	1
B. VISI MISI	1
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	1
II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	2
III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	2
IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	3
V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4
VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	4
A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017	4
B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017	5
VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI	5
VIII. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	6
B. SARAN	6

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 (Format A.1)*
2. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 (Format A.2)*
3. *Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 (Form. B)*
4. *Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)*
5. *Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)*
6. *Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)*
7. *Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)*
8. *Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk padaak hirbulan Desember.*

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KARANGTENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI

Visi Desa

“ Terbangunnya tata kelola pemerintah desa Karangtengah yang baik dan bersih guna mewujudkan Kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera “

Misi Desa

1. Meningkatkan sistem kinerja aparatur pemerintah desa demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lain.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai pendampingan kepada masyarakat.
5. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang lebih maju dan mandiri.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa, kelembagaan desa serta Masyarakat Desa Karangtengah pada umumnya telah menghasilkan rumusan, yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjaring aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah (Gakin) sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban serta penjabaran Visi Misi Desa. Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Karangtengah adalah:

- a. Belum memadainya sarana prasarana Desa seperti infrastruktur jalan, pendidikan maupun ekonomi, kesehatan dan komunikasi.
- b. Masih rendahnya kapasitas perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- c. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Desa.
- d. Kapasitas Kelembagaan Desa Masih Rendah.
- e. Belum ada fasilitas akses informasi Desa berbasis Teknologi.
- f. Terbatasnya pembinaan generasi muda Desa.
- g. Tingkat penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah.
- h. tidak tersedianya tenaga kesehatan yang berdomisili di Desa serta infrastruktur kesehatan masih belum tersedia.
- i. Masyarakat sangat kesulitan akses air bersih pada saat musim kemarau.
- j. Kesejahteraan Masyarakat masih sangat rendah.
- k. Kapasitas Aparat masih sangat rendah.
- l. Pememfaatan irigasi Desa belum maksimal.
- m. kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat
2. Kegiatan operasional pemerintahan desa
3. Kegiatan tunjangan dan oprasional BPD
4. Kegiatan oprasional RT dan RW
5. Kegiatan pengadaan peralatan kantor
6. Kegiatan pendataan potensi desa (Propil desa dan monografi desa)
7. Kegiatan pembahasan RAPBDes dan penetapan APBDes
8. Kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa
9. Kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes)
10. Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah Desa
11. Kegiatan Penyelenggaraan perencanaan Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat
2. Kegiatan operasional pemerintahan desa
3. Kegiatan tunjangan dan oprasional BPD
4. Kegiatan oprasional RT dan RW
5. Kegiatan pengadaan peralatan kantor
6. Kegiatan pendataan potensi desa (Propil desa dan monografi desa)
7. Kegiatan pembahasan RAPBDes dan penetapan APBDes
8. Kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa
9. Kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes)
10. Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah Desa
11. Kegiatan Penyelenggaraan perencanaan Desa

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Gedung TK
2. Kegiatan Pembangunan Pagar Gedung TK Dan MI
3. Kegiatan Pembangunan Pagar Gedung PAUD
4. Kegiatan Peningkatan penyelenggaraan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA)

5. Kegiatan Pengadaan Mesin Pompa dan Instalasinya
6. Kegiatan Pembangunan Pos Keamanan Desa
7. Kegiatan Pembangunan jalan lingkungan, pavingisasi
8. Kegiatan Pembangunan Jembatan/Gorong-gorong lingkungan
9. Kegiatan Pembangunan Talang Air Saluran irigasi
10. Kegiatan Pembangunan tembok penahan jalan Karanganyar
11. Kegiatan Pembangunan tembok penahan jalan Krajan
12. Kegiatan Pembangunan tembok penahan jalan Karangasem
13. Kegiatan Pembangunan saluran air hujan/drainase
14. Kegiatan Pembangunan Lapangan Volley
15. Kegiatan Pembangunan pagar makam
16. Kegiatan Pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios)

Program Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Gedung TK
2. Kegiatan Pembangunan Pagar Gedung TK Dan MI
3. Kegiatan Pembangunan Pagar Gedung PAUD
4. Kegiatan Peningkatan penyelenggaraan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA)
5. Kegiatan Pengadaan Mesin Pompa dan Instalasinya
6. Kegiatan Pembangunan Pos Keamanan Desa
7. Kegiatan Pembangunan jalan lingkungan, pavingisasi
8. Kegiatan Pembangunan Jembatan/Gorong-gorong lingkungan
9. Kegiatan Pembangunan Talang Air Saluran irigasi
10. Kegiatan Pembangunan tembok penahan jalan Karanganyar
11. Kegiatan Pembangunan tembok penahan jalan Krajan
12. Kegiatan Pembangunan tembok penahan jalan Karangasem
13. Kegiatan Pembangunan saluran air hujan/drainase
14. Kegiatan Pembangunan Lapangan Volley
15. Kegiatan Pembangunan pagar makam
16. Kegiatan Pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios)

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Operasional LPMD
2. Kegiatan Operasional PKK
3. Kegiatan Operasional Karang Taruna
4. Kegiatan Operasional Posyandu
5. Kegiatan Operasional Pokja Penanggulangan Kemiskinan
6. Kegiatan Pelatihan Linmas dan TAGANA
7. Kegiatan sedekah bumi (manganan)
8. Kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN)
9. Kegiatan peringatan hari besar Keagamaan (PHBK)
10. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong (BBGR)

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Operasional LPMD
2. Kegiatan Operasional PKK
3. Kegiatan Operasional Karang Taruna
4. Kegiatan Operasional Posyandu
5. Kegiatan Operasional Pokja Penanggulangan Kemiskinan
6. Kegiatan Pelatihan Linmas dan TAGANA
7. Kegiatan sedekah bumi (manganan)
8. Kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN)
9. Kegiatan peringatan hari besar Keagamaan (PHBK)

10. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong (BBGR)

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang)
2. Kegiatan fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi kader Posyandu
3. Kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkatdesa dan badan permusyawaratan desa
4. Kegiatan pelatihan ketrampilan bagi kelompok perempuan
5. Kegiatan Pelatihan Teknis Usaha Perikanan
6. Kegiatan Peningkatan peran tim KB desa
7. Kegiatan Fasilitasi peningkatan capaian KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
8. Kegiatan Peningkatan kegiatan bina keluarga balita (BKB)
9. Kegiatan Peningkatan kegiatan bina keluarga Lansia (BKL)

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang)
2. Kegiatan fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi kader Posyandu
3. Kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkatdesa dan badan permusyawaratan desa
4. Kegiatan pelatihan ketrampilan bagi kelompok perempuan
5. Kegiatan Pelatihan Teknis Usaha Perikanan
6. Kegiatan Peningkatan peran tim KB desa
7. Kegiatan Fasilitasi peningkatan capaian KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
8. Kegiatan Peningkatan kegiatan bina keluarga balita (BKB)
9. Kegiatan Peningkatan kegiatan bina keluarga Lansia (BKL)

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Karangtengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah dirubah ke Peraturan Desa Karangtengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan dijabarkan ke peraturan kepala Desa Karangtengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2017, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan desa	Rp. 1.221.258.757,00
2. Belanja desa	Rp. 1.235.827.257,00
a) Bidang penyelenggraan Pemerintah Desa	Rp. 387.032.900,00
b) Bidang Pembangunan	Rp. 772.539.000,00
c) Bidang pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 42.005.357,00

d) Bidang pemberdayaan Masyarakat	Rp.	34.250.000,00
e) Bidang Tak terduga	Rp.	0,00
Surplus/Defisit		(14.568.500,00)
3. Pembiayaan Desa	Rp.	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	14.568.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	(14.568.500,00)

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017, dengan rincian terlampir pada format B.

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Karangtengah, dapat diurai dalam tabel dibawa ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Peningkatan Realisasi PBB 3. Penataan rencana pembangunan Desa	1. Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Desa 2. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB	1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan 2. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana air bersih 2. Kinerja pengelola sarana air bersih belum maksimal	1. Menertibkan petugas air bersih secara maksimal 2. Perlu revitalisasi pengurus sarana air bersih
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Penataan Pos keamanan 2. Terciptanya keindahan dan kebersihan lingkungan 3. Meningkatnya pemahaman agama 4. Terwujudnya santri dan santriwati yang mahir dalam baca Tulis Al-Quran 5. meningkatnya kesejahteraan kader posyandu 6. Meningkatnya Minat belajar siswa 7. Terciptanya (SDM) Perangkat desa dalam mengelolah keuangan Desa berbasis Siskeudes	1. Pemanfaatan Sarana Pos keamanan yang belum maksimal 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan 3. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pengajian (Majelis Taklim) 4. Kurangnya tenaga ahli (Hafidz) dalam membina baca tulis Alquran 5. kurangnya pembinaan kader Posyandu 6. Terdapat kekeliruan data siswa berprestasi	1. Penertiban pemaanfaat Pos keamanan 2. Sosialisasi kebersihan lingkungan dari pemerintah Desa 3. Membutuhkan pendekatan persuasif 4. Mendatangkan tenaga ahli (Hafidz) 5. Mengadakan pelatihan dan pembinaan kader 6. Membutuhkan ketelitian data

			7. Kurangnya perhatian perangkat Desa dalam mengembangkan SDM secara berkelanjutan	siswa dari Wali kelas yang bersangkutan 7. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Terwujudnya keindahan dan kebersihan kantor 2. Ditetapkannya pengurus Bumdes yang baru 3. Peningkatan SDM melalui pelatihan	1. Petugas kebersihan masih perlu pembinaan dalam kesadaran kebersihan kantor 2. pengurus Bumdes baru masih membutuhkan data dan informasi dari pengurus Bumdes sebelumnya 3. Kurangnya pemahaman materi pelatihan peningkatan SDM	1. Pembinaan dan perhatian khusus petugas kebersihan kantor 2. Mengadakan pertemuan pengurus Bumdes lama dan pengurus Bumdes Baru 3. Membutuhkan pelatihan peningkatan yang berlanjut

VIII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/ walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Karangtengah
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Karangtengah tahun anggaran 2017 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Karangtengah

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangtengah Akhir Tahun Anggaran 2017. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Perangkat Desa Karangtengah dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Karangtengah.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2017 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Karagtengah, 10 Maret 2018
KEPALA DESA KARANGTENGAH,

BASUKI RAHMAD

LAMPIRAN-LAMPIRAN